Lampiran VII :
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 900/7999
TANGGAL : 5 Desember 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SKPD/OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 96);

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 104 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 104);
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 105);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 89).

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.1.1 Pendapatan

Mulai Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tidak mengelola pendapatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.361.853.055,00 dari anggaran sebesar Rp7.501.751.682.000,00 atau mencapai 98,14%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.263.405.737,00 realisasinya mengalami penurunan sebesar 23,48%. Disdukcapil Kabupaten Kebumen mampu meningkatkan kinerja realisasi belanja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 3,04%.

2.1.2.1 Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Belanja per Akun

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	3.853.251.000	3.772.579.467	97,91
2. Belanja Barang	2.679.722.682	2.651.805.588	98,96
Jumlah Belanja Operasi	6.532.973.682	6.424.385.055	98,34
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.778.000	937.468.000	96,77
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Modal	968.778.000	937.468.000	96,77
JUMLAH BELANJA	7.501.751.682	7.361.853.055	98,14

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

2.2.1 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan Atas Belanja

Deviasi anggaran belanja Tahun 2023 Disdukcapil Kabupaten Kebumen sebesar 1,86% atau sisa anggaran sebesar Rp139.898.627,00. Sisa anggaran ini terdiri atas sisa anggaran gaji dan tunjangan ASN Rp80.667.033,00, sisa tender dan selisih harga pengadaan barang/jasa Rp52.789.404,00, sisa gaji Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (P2K) yang meninggal dunia Rp5.224.500,00 dan lain-lain Rp1.217.690,00. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan atas belanja dikarenakan faktor eksternal yaitu tidak terisinya 1 orang Pejabat Eselon IV sejak 1 Juli 2023 sehingga terdapat sisa anggaran gaji dan tunjangan yang cukup besar.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan - LRA

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tidak mengelola pendapatan. Pengelolaan pendapatan terakhir pada tahun 2022 dengan jumlah pendapatan Rp335.645.000,00 yaitu dari Lain-Lain PAD yang Sah Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.

2. Belanja - LRA

Realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA. 2023 adalah sebesar Rp7.361.853.055,00 atau 98,14% dari anggaran sebesar Rp7.501.751.682,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA. 2023 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2023

URAIAN	2023		%	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	3.853.251.000	3.772.579.467	97,91	4.082.331.446
2. Belanja Barang	2.679.722.682	2.651.805.588	98,96	4.069.060.026
3. Belanja Hibah	0	0	0,00	0
4. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Operasi	6.532.973.682	6.424.385.055	98,14	8.151.391.472
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.778.000	937.468.000	96,77	1.107.754.265
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0,00	0
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	4.260.000
6. Belanja Modal aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Modal	968.778.000	937.468.000	96,77	1.112.014.265
JUMLAH BELANJA	**7.501.751.682**	**7.361.853.055**	**98,14**	**9.263.405.737**

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2023 dengan TA. 2022 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.901.552.682,00 atau 20,53%.

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp1.727.006.417,00 atau 21,19% dan Belanja Modal juga turun Rp174.546.265,00 atau 15,70%.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp6.424.385.055,00 mencapai 98,34% dari anggaran sebesar Rp6.532.973.682,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang sebesar Rp8.151.391.472,00 mengalami penurunan sebesar 26,88%.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa TA. 2022 dan 2021 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.2 Belanja Operasi

Belanja Operasi	2023		(%)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1. Belanja Pegawai	**3.853.251.000**	**3.772.579.467**	**97,91**	**4.082.331.446**
a. Belanja Gaji Pokok PNS	1.449.986.000	1.426.164.900	98,36	1.629.851.840
b. Belanja Gaji Pokok PPPK	199.780.000	199.538.800	99,88	148.696.200
c. Belanja Tunjangan Keluarga PNS	114.940.000	110.233.693	95,91	136.308.385
d. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.000.000	13.772.424	98,37	11.304.252
e. Belanja Tunjangan Jabatan PNS	94.230.000	81.110.000	86,08	153.210.000
f. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	75.450.000	74.369.900	98,57	7.560.000
g. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.390.000	32.440.000	97,15	39.260.000
h. Belanja Tunjangan Beras PNS	69.966.000	66.119.460	94,50	78.720.540
i. Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.640.000	10.573.320	99,37	8.473.140
j. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.000.000	7.926.224	99,08	9.780.792
k. Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.000	15.800	92,94	23.443
l. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	3.914	78,28	2.740
m. Belanja Iuran Jaminan	115.500.000	111.504.518	96,54	123.118.573

Kesehatan PNS				
n. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.800.000	7.347.418	94,20	5.688.912
k. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.000	2.914.105	97,14	3.306.793
l. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	430.000	412.294	95,88	317.216
m. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.000.000	8.742.372	97,14	9.920.451
n. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.300.000	1.236.896	95,15	951.664
o. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.611.780.000	1.584.120.929	98,28	1.672.790.005
p. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32.797.000	32.792.500	99,99	40.138.500
q. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	340.000	340.000	100,00	408.000
r. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	900.000	900.000	100,00	2.500.000
2 .Belanja Barang	**2.679.722.682**	**2.651.805.588**	**98,96**	**4.069.060.026**
a. Belanja Barang	1.186.723.682	1.165.846.730	98,24	2.208.109.808
b. Belanja Jasa	1.195.572.000	1.188.859.740	99,44	1.385.456.218
c. Belanja Pemeliharaan	95.983.000	95.775.500	99,78	209.355.030
d. Belanja Perjalanan Dinas	201.444.000	201.323.618	99,94	266.138.970
Total Belanja Operasi	**6.532.973.682**	**6.424.385.055**	**98,34**	**8.151.391.472**

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3.772.579.467,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp3.853.251.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 7,59%. Serapan belanja pegawai secara umum menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi. Serapan tertinggi atas Belanja Pegawai adalah Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan yaitu sebesar 100,00% sedangkan serapan terendah pada Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar 78,28%. Anggaran Belanja tersebut terserap kecil karena anggaran yang kecil dalam nominal rupiah hanya Rp5.000,00.

Belanja barang terealisasi sebesar Rp2.651.805.588,00 atau 98,96% dari anggaran sebesar Rp2.679.722.682,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 34,83%. Serapan belanja barang dan jasa secara umum menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga terjadi

efisiensi. Belanja Barang terealisasi paling rendah sebesar 98,24% berasal sisa tender pengadaan barang. Serapan belanja barang tertinggi pada Belanja Belanja Perjalanan Dinas yaitu sebesar 99,94%.

b) Belanja Modal

Tabel 3.3 Belanja Modal

Belanja Modal	2023		(%)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	968.778.000	937.468.000	96,77	1.107.754.265
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Aset tetap Lainnya	0	0	0,00	4.260.000
Belanja Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	**968.778.000**	**937.468.000**	**96,77**	**1.112.014.265**

Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp937.468.000,00 atau tercapai 96,77% dari anggaran sebesar Rp968.778.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.112.014.265,00 realisasi belanja modal tahun 2023 turun sebesar 15,70%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Belanja Modal Tahun 2023

Uraian	2023		(%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.000.000	100,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	248.800.000	245.200.000	98,55
Belanja Modal Mebel	75.058.000	74.229.000	98,90
Belanja Modal Alat Pembersih	3.615.000	3.450.000	95,44
Belanja Modal Alat Pendingin	46.827.000	45.740.000	97,68
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.200.000	46.176.000	99,95
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.190.000	4.100.000	97,85
Belanja Modal Personal Computer	242.822.000	240.590.000	99,08

Belanja Modal Peralatan Personal Computer	31.850.000	31.150.000	97,80
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	265.416.000	242.833.000	91,49
Jumlah	**968.778.000**	**937.468.000**	**96,77**

Belanja modal yang realisasinya tertinggi sebesar 100,00% adalah Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sedangkan belanja modal yang realisasinya terendah yaitu Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dengan realisasi 91,49%, hal ini disebabkan adanya efisiensi atas harga belanja modal tersebut.

3.1.2 Neraca

3.1.2.1 Aset

3.1.2.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.409.428.835,00 dan Rp1.409.428.835,00 naik sebesar 12,16%. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Aset Lancar	TA 2023	TA 2022
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
3	Kas di BLUD	0	0
4	Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
5	Investasi Jangka Pendek	0	0
6	Piutang Pendapatan	0	0
7	Piutang Lainnya	0	0
8	Penyisihan Piutang	0	0
9	Beban dibayar di muka	0	0
10	Persediaan	1.409.428.835	1.409.428.835
	Jumlah	**1.409.428.835**	**1.409.428.835**

1) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.409.428.835,00 dan Rp1.409.428.835,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp1.409.428.835,00 merupakan saldo persediaan atas bahan habis pakai dan bahan material yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

Tabel 3.6 Rincian Persediaan Tahun 2023 dan 2022

No	Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Audited) (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	790.997.000	790.997.000
2.	Barang Cetakan	618.431.835	618.431.835
3.	Alat Kebersihan	0	0
4.	Alat Listrik	0	0
Jumlah		**1.409.428.835**	**1.409.428.835**

3.1.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp5.294.714.097,00* dan Rp5.315.365.520,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.7 Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2023	T.A 2022
1	Tanah	182.077.972	182.077.972
2	Peralatan dan Mesin	11.400.939.811	10.463.471.811
3	Gedung dan Bangunan	3.787.276.333	3.787.276.333
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.272.700	118.272.700
5	Aset Tetap Lainnya	11.060.000	11.060.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9.271.704.719)*	(9.246.793.296)
Jumlah		**5.294.714.097***	**5.315.365.520**

1) Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp182.077.972,00. Tidak ada penambahan nilai tanah pada tahun 2023.

Tanah yang tercatat di Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

Tabel 3.8 Rincian Tanah

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah Kampung	182.077.972	0	0	182.077.972
	Jumlah	**182.077.972**	**0**	**0**	**182.077.972**

2) Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp11.400.939.811,00 dan Rp10.463.471.811,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2022	Rp 10.463.471.811
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp 937.468.000
Mutasi dari SKPD lain	Rp 0
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp 0
Hibah	Rp 0
Total tambah	Rp 937.468.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp 0
Rusak Berat	Rp 0
Mutasi ke SKPD lain	Rp 0
Koreksi	Rp 0
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp 0
Total kurang	Rp 0
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp 11.400.939.811**

Adapun mutasi tambah sebesar Rp937.468.000,00 merupakan belanja modal pada tahun 2023. Belanja modal tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Belanja Modal Tahun 2023

No.	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Sofa Busa	1	buah	6.580.000	6.580.000
2.	Vacuum Cleaner Wet and Dry	1	unit	3.450.000	3.450.000
3.	LCD Projector	1	unit	5.550.000	5.550.000

4.	AC Split 1 PK	1	unit	4.100.000	4.100.000
5.	AC Split 2 PK	2	unit	8.200.000	16.400.000
6.	Rak Arsip	2	unit	2.000.000	4.000.000
7.	Kursi Kantor	4	buah	840.000	3.360.000
8.	Kursi Kerja Eselon IV	2	buah	2.035.000	4.070.000
9.	Kursi Kerja Staf	6	buah	740.000	4.440.000
10.	Kursi Rapat	18	buah	428.000	7.704.000
11.	Meja Kerja Staf	5	buah	2.415.000	12.075.000
12.	Laptop Core i5	10	unit	12.825.000	128.250.000
13.	PC Computer Core i5	7	unit	14.000.000	84.000.000
14.	PC Computer Core i5	1	unit	14.340.000	14.340.000
15.	Kipas Angin Stand	1	buah	340.000	340.000
16.	AC Split 2 PK	3	unit	8.300.000	24.900.000
17.	Alat Pemadam Kebakaran 9 kg Powder	2	buah	2.050.000	4.100.000
18.	Printer Scan Copy	7	unit	4.450.000	31.150.000
19.	Fingerprint Scanner	8	unit	30.650.000	245.200.000
20.	Back Droop	28	m2	1.649.143	46.176.000
21.	Front Office	2	set	18.000.000	36.000.000
22.	Scanner Iris Mata untuk KTP	7	unit	18.919.000	132.919.000
23.	Signature Pad KTP-el	9	unit	11.650.000	104.850.000
	Jumlah				**937.468.000**

3) Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp3.787.276.333,00. Tidak ada penambahan nilai Gedung dan bangunan pada tahun 2023.

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.787.276.333,00 dapat disajikan dalam tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Rincian Gedung

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Gedung Kantor	3.303.129.133	0	0	3.303.129.133

2	Bangunan Gedung Instalasi	324.847.200	0	0	324.847.200
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool	159.300.000	0	0	159.300.000
	Jumlah	**3.787.276.333**	**0**	**0**	**3.787.276.333**

3.1.2.1.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sama sebesar Rp11.060.000,00. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.060.000,00 dapat dijelaskan dalam tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Buku umum	6.520.000	0	0	6.520.000
2	Buku agama	380.000	0	0	380.000
3	Buku Ilmu Sosial	3.790.000	0	0	3.790.000
4	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	370.000	0	0	370.000
	Jumlah	**11.060.000**	**0**	**0**	**11.060.000**

Tidak ada penambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023.

3.1.2.1.4 Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA. 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 9.271.704.719,00* dan Rp9.246.793.296,00.

3.1.2.2 Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2023.

3.1.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

3.1.2.3.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Nilai Saldo aset tidak berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Di dalam neraca nilai aset tidak berwujud disajikan dengan nilai bersih setelah dikurangi penyusutan.

3.1.2.2 Kewajiban

3.1.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp122.654.776,00 dan Rp127.086.301,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tabel 3.12 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	0
2	Pendapatan diterima Dimuka	0	0
3	Utang Beban	122.654.776	127.086.301
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah		**122.654.776**	**127.086.301**

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Saldo Utang kepada Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

2) Utang Beban

   Saldo Utang Beban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp122.654.776,00 dan Rp127.086.301,00.

   Utang Beban merupakan kewajiban kepada pihak lain atas belanja kegiatan yang belum terbayarkan sampai tanggal neraca. Berikut rincian utang beban per 31 Desember 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel 3.13 Rincian Utang Beban

No.	Utang Beban	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Beban Pegawai	122.590.276	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2023
2.	Beban Barang dan Jasa	64.500	Beban Tagihan Air Bulan Desember 2023
	Jumlah	**122.654.776**	

3.1.2.3 Ekuitas

3.1.2.3.1 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.577.046.631,00* dan Rp6.597.708.054,00.

3.1.3 Laporan Operasional

3.1.3.1 Pendapatan – LO

Mulai Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengelola pendapatan, mengelola pendapatan terakhir tahun 2022 dengan Pendapatan-LO sebesar Rp335.645.000,00

Tabel 3.14 Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Audited) (Rp)
1	Lain-Lain PAD yang Sah	0	335.645.000
Jumlah		**0**	**335.645.000**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah ini adalah Denda atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

3.1.3.2 Beban - LO

Realisasi Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada TA.2023 adalah sebesar Rp9.270.163.598,00* dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15 Rincian Beban - LO

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan (Penurunan)	(%)
BEBAN				

Beban Pegawai	3.944.537.303*	3.388.423.400	556.113.903*	16,41*
Beban Barang dan Jasa	5.325.626.295*	4.393.443.234	932.183.061*	21,22*
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	*	979.726.483	*	*
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0*	75.745.526	*	*
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0*	2.968.717	*	*
Total Beban	**9.270.163.598***	**8.840.307.360**	****	****

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban LO tahun 2023 menurun sebesar Rp *,00 atau sebesar *% dibandingkan tahun 2022.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp *,00 naik *% dari tahun 2022.

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa TA. 2023 sebesar Rp *,00 naik *% dari tahun 2022.

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp*,00 merupakan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2023.

3.1.3.3 Surplus/defisit – LO

Surplus defisit – LO untuk tahun 2023 sebesar Rp(8.934.518.598,00)* atau naik sebesar 7,17%* dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp(8.336.389.625,00).

3.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp6.222.935.158,00 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2023 sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp6.222.935.158,00
Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp 0,00
Ekuitas Dana Cadangan sebesar	Rp 0,00
Jumlah	Rp6.222.935.158,00

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(8.934.518.598,00)* dan Rp(8.336.389.625,00).

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Nilai Persediaan sebesar	Rp	0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar	Rp	0,00

4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.288.630.071,00* dan Rp8.336.389.625,00.

5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.577.046.631,00* dan Rp6.222.935.158,00.

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 Penjelasan Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jalan HM. Sarbini No. 87 Kebumen merupakan salah satu instansi yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan publik di bidang Kependudukan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

   1. Penyusunan rencana dan program di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   2. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   3. Pelaksanaan koordinasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   4. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
   6. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
   7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan pada kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan :

1. Adanya penanganan yang serius dari pemerintah daerah dan keterlibatan dari berbagai instansi yang berwenang;

2. Semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses dan sistem pembuatan dokumen kependudukan;
3. Melakukan Jemput bola ke desa-desa di 26 kecamatan, sekolah menengah atas, Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen untuk melakukan pelayanan untuk masyarakat umum, disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
4. Melakukan inovasi-inovasi percepatan pencetakan dokumen kependudukan serta terus mengembangkan inovasi pelayanan publik antara lain:
    a. Balada PAK-KIS (Bayi Lahir Dapat Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Indonesia Sehat)

        Inovasi ini merupakan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Kebumen. Inovasi “BALADA PAK-KIS” (Bayi Lahir Dapat Paket Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Indonesia Sehat) ditandai dengan Penandatanganan PKS pada tanggal 1 September 2021 dan telah di launching tanggal 16 September 2021 oleh Bupati Kebumen Di Mexolie Hotel Kebumen. Dalam kerja sama ini, Bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kebumen, serta KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang diterbitkanoleh BPJS Kesehatan Cabang Kebumen. Balada Pak-KIS juga bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik bersalin untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut.

    b. Ketapel 17

        Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang diperuntukan bagi wajib KTP-el pemula atau usia 17 tahun, dimana pada saat usia 17 tahun, langsung menerima KTP-el sebagai hadiah ulang tahun dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

    c. Kios Pelanduk

        Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang melayani pelayanan di Desa/Kelurahan. Inovasi Kios Pelanduk merupakan inovasi pelayanan publik yang melayani Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perpindahan Keluar, Kedatangan dalam satu Desa/Kelurahan.

    d. Pulpen ASN (Paket Untuk Layanan Pensiunan ASN)

        Inovasi ini merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk mempermudah pegawai pensiunan dalam mendapatkan dokumen – dokumen kependudukannya. Yaitu para ASN yang pensiun pada saat menerima SK Pensiunan/Taspen langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa KK, KTP-El, dengan status pekerjaan berubah menjadi pensiunan.

e. Pesona Sunday Morning (Pelayanan Adminduk untuk Semua Orang Sinamb)

   Inovasi ini merupakan pelayanan administrasi kependudukan untuk semua orang yang membahagiakan pada hari minggu pagi yang dilaksanakan di alun-alun dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Pelayanan administrasi kependudukan yang diperuntukkan bagi semua orang yang membahagiakan sambil santai dokumen administrasi kependudukan bisa anyar maning (sambil bersantai juga bisa mendapat dokumen adminduk baru lagi).

f. Lawet Kebumen

   Pelayanan Administrasi Kependudukan Warga Kabupaten Kebumen secara Elekteronik dan Terintergari dari Smartphone Android.

g. WA Tiket

   Pelayanan online menggunakan aplikasi whatsapp (WA) dimana masyarakat pemohon langsung bisa berhubungan langsung dengan operator terkait sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan

h. Gerlin Difaduk (Gerakan Perlindungan Difabel sadar Adminduk)

   Inovasi ini merupakan program jemput bola untuk melayani proses pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependuduk bagi masyarakat Disabilitas/Difabel yang tidak bisa datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Tempat Perekaman Data Penduduk (TPDK) di 26 Kecamatan. Inovasi ini sudah di launching pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen di area Disdukcapil Kebumen.

i. Peti Megatruh (Pelaporan Kematian Melalui Gerakan Adminduk Cepat, Akurat, dan Handal)

   Inovasi ini merupakan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan berbagai pihak seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan fasilitas kesehatan dalam pelaporan kematian penduduk. Hal ini sangat penting dalam rangka memutakhirkan data kependudukan di Kabupaten Kebumen Inovasi ini sudah di launching pada tanggal 5 Agustus 2022 oleh Bupati Kebumen di area Disdukcapil Kebumen.

j. Yandis Terpadu

   Pelayanan Administrasi Kependudukan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP).

k. Gerbang Harapan

   Gerakan bersama Administrasi Kependudukan mengelola hasil laporan putusan dan penetapan Pengadilan Negeri Kebumen.

l. Layak Menikah Ijabah

   Inovasi yang bekerja sama dengan kantor Kemenag Kabupaten Kebumen melalui pernikahan Identitas jadi berubah

m. Santri One Paduka

   Memudahkan Masyarakat yang telah bercerai dalam mengurus hanya melelaui satu pintu

5. Meningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis;
6. Meningkatnya pengelolaan dokumen dan sinergitas/sinkronisasi program kependudukan dan catatan sipil antar pemangku kepentingan.

4.2 Informasi Umum Tentang Entitas

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen disusun dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diberlakukan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun dengan menggunakan basis akrual yang memuat tentang Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023.

Kebumen, 31 Desember 2023

PENGGUNA ANGGARAN



ANNA RATNAWATI, S.KM., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19640629 198803 2 002